

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG
BERINTEGRITAS DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Diajukan Oleh
SUDONO
201902030**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2021**

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG
BERINTEGRITAS DI KABUPATEN DEMAK

Disusun oleh

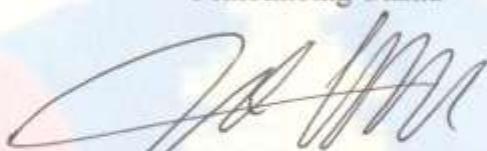
SUDONO

201902030

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

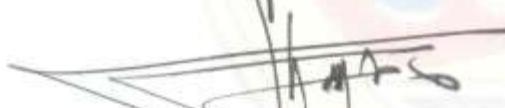
Pada tanggal 24 Februari 2021

Susunan Dewan Pengaji
Pembimbing Utama



Dr. Dra. Sulistyowati., SH. C.N.

Anggota Dewan Pengaji I



Dr. Hidayatullah. S.H M.Hum

Anggota Dewan Pengaji II



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 25 Februari 2021



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Qs Al-Ankabut: 6)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(H.R. Muslim)

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Almamaterku.
2. Keluarga besarku
3. Rekan-rekan kerja seperjuangan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDONO

NIM : 201902030

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Februari 2021

Yang membuat pernyataan



SUDONO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penerapan Hukum Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Untuk Mewujudkan Aparatur Yang Berintegritas Di Kabupaten Demak”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum.

Segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak tidaklah mungkin dapat terselesaikan penulisan tesis ini, sehingga dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengaruhannya dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Iskandar Wibawa S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

4. Ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKS	x
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Hukuman Dispilin Pegawai Negeri Sipil.....	21
B. Tinjauan Mengenai Kedisiplinan.....	29

C. Tinjauan Mengenai Aparatur Pemerintah	39
D. Tinjauan Tentang Integritas	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ..	50
1. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.....	50
2. Penerapan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Demak	52
B. Penegakan Disiplin yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dapat Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Berintegritas	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Simpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak yang Terkena Hukuman Disiplin Tahun 2015-2019	4
Tabel 2 Jumlah PNS Kabupaten Demak yang Terkena Hukuman Disiplin Berdasarkan Klasifikasi Hukuman Tahun 2015-2019....	4
Tabel 3 Daftar Nama-nama PNS Kabupaten Demak yang Dijatuhi Disiplin Tahun 2019	5
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	7

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG
BERINTEGRITAS DI KABUPATEN DEMAK**

Sudono¹, Sulistyowati²

Universitas Muria Kudus

Sudono@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Penerapan Hukum Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Untuk Mewujudkan Aparatur Yang Beintegritas di Kabupaten Demak. Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Non Doktrinal atau yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penerapan disiplin yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan baik, masih ada kendala namun dari tahun 2015-2019 terdapat penurunan jumlah kasus PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berperilaku disiplin serta integritas merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pegawai dalam melaksanakan tugas. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang baik akan dapat mewujudkan kelima karakteristik integritas sehingga apabila kelima karakteristik yaitu : bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersikap obyektif dapat terpenuhi, maka akan terwujud integritas Pegawai Negeri Sipil yang baik.

Kata kunci : Hukum Disiplin, Berintegritas, Pegawai Negeri Sipil

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

**IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE LAW FOR CIVIL STATE
EMPLOYEES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 53
YEAR 2010 CONCERNING EMPLOYEE DISCIPLINES FOR CIVIL STATE
TO MAKE INTEGRATED APPLICERS IN DEMAK DISTRICT**

Sudono¹ Sulistyowati²
Universitas Muria Kudus
Sudono@umk.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled Application of Discipline Law for Civil Servants Based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline to Create Apparatus with Integrity in Demak Regency. The utilization of the state apparatus continues to be improved, especially those related to the quality, efficiency of services and protection of the community as well as the professional ability and welfare of the apparatus which are of great concern in supporting the implementation of duties. The Basic Personnel Law, namely Law Number 8 of 1974, has been amended through Law Number 43 of 1999 concerning Civil Servants, and is further regulated by Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline, which is a legal basis for guaranteeing employees. country and can be used as the basis for regulating the proper and correct preparation of the state apparatus.

The approach method used is sociological juridical and data collection is carried out using the interview method with the research location in the Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak. The sampling method used was purposive sampling, while the results of data processing were presented in the form of descriptive analysis

The arrangement of the state apparatus towards perfect administration is highly dependent on the quality of the civil servants and the quality of the neatness of the apparatus organization itself. The position of the Civil Servant is very important and decisive. The success or failure of the mission of the government depends on the state apparatus because Civil Servants are the state apparatus to organize the government in realizing the ideals of national development. Civil servants are not only elements of the state apparatus but also state servants and community servants who always live in the midst of society and work for the benefit of society.

Keywords: Discipline Law, Integrity, Civil Servants

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus